

JAKARTA LUMPUH AKIBAT BANJIR

Banjir bak melumpuhkan Jakarta, usai diguyur hujan deras sejak Selasa (18/11/2015) siang. Titik banjir hingga petang sebanyak 30 rukun tetangga (RT) dengan ketinggian air mencapai 90 cm. Tampak letugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dan menerobos banjir di Pondok Karya akibat intensitas hujan tinggi dan Luapan Kali Mampang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini dipicu oleh suhu muka laut yang lebih hangat dari rata-rata dan aktifnya monsun Asia. (ist.cnbcs)

Pembangunan Koperasi Merah Putih

AGRINAS PATOK BIAYA RP 1,6 M/UNIT, DPR 'NGEGAS'

PT Agrinas Pangan Nusantara menganggarkan biaya pembangunan untuk setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. Angka fantastis itupun langsung membuat DPR RI 'ngegas'. Artinya, dibutuhkan total

duit Rp 128 triliun untuk pembangunan unit saja. Komisi VI DPR RI meragukan 80.000 Kopdes Merah Putih akan dibangun dengan desain yang telah dibuat tersebut. Para wakil rakyat juga menilai sebagai pemborosan biaya. Dengan target pasar lokal di pedesaan, bangunan yang dirancang Agrinas dengan anggaran besar itu dinilai terlalu mewah. Sorotan lain adalah terkait rencana menjadikan dana desa sebagai jaminan 30% dari pembiayaan koperasi sebesar Rp 3 miliar per unit. Hal itu dinilai dapat membebani keuangan negara jika tidak dikelola dengan hati-hati. Protes dari pemerintah desa mulai menyeruak karena pemerintah akan memangkas anggaran dana desa sebesar Rp40 triliun untuk Kopdes Merah Putih. Sehingga dana desa yang tersisa untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp20 triliun. Lantaran alokasi dana desa di tahun 2026 sebesar Rp60 triliun.

BACA HAL 11...

TOTAL ANGGARAN

Rp83 triliun (Rp16T cair 2025, Rp67T cair 2026) melalui Himbara.

Target Operasi

80.000 Kopdes aktif penuh pada Maret 2026.

Sumber Data:
Berbagai Sumber Diola

Modal per koperasi

Maksimal Rp3 miliar per unit.

Sumber dana

Seluruhnya berasal dari pajak.

Revisi regulasi

Mekanisme kredit sedang disesuaikan lewat PMK 49/2025.

PEMBANGUNAN KOPDES MERAH PUTIH OLEH AGRINAS



Jumlah gerai:
80.000 unit di seluruh Indonesia.



Target selesai:
Pembangunan 80.000 gerai ini ditargetkan rampung pada Maret



Biaya per unit:
Diperkirakan sebesar Rp1,6 miliar hingga Rp1,65 miliar.



Desain
Desain bangunan yang seragam, berukuran 20 x 30 meter.



Keterlibatan TNI
Anggota TNI ikut dalam pembangunan fisik dan fasilitas pendukung.



TENTANG KOPDES MERAH PUTIH

TEMUAN BPK- BUMN-BADAN NEGARA BOROS RP43 TRILIUN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat ketidakefisienan, ketidakefektifan, atau pemborosan yang dilakukan oleh sejumlah badan negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai total mencapai sekitar Rp43,35 triliun. Sementara, secara total dilaporkan adanya persoalan dalam keuangan negara senilai Rp 69,21 triliun sepanjang semester I tahun 2025.

Hal tersebut terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2025 yang dibacakan oleh Ketua BPK Isma Yatun dalam Agenda Sidang Paripurna ke-8 di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Serta pengungkapan ketidak-hematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan pada BUMN dan Badan lainnya dengan nilai sebesar Rp43,35 triliun," ujar Isma Yatun dalam laporannya.

Secara total, BPK melaporkan adanya persoalan dalam keuangan negara senilai Rp 69,21 triliun sepanjang semester I tahun 2025.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, nilai tersebut terdiri dari pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp25,86 triliun.

Selain itu juga ditemukan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya senilai Rp43,35 triliun.

Isma Yatun, mengatakan IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025,

"Terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT)," kata Isma.

Selain itu, IHPS I Tahun 2025 juga berisi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 491 pemerintah daerah memperoleh opini WTP, 53 pemerintah daerah mendapatkan opini WDP, dan satu pemerintah daerah

menerima opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap empat laporan keuangan lembaga lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2024. Seluruhnya meraih opini WTP.

Pada semester I 2025, BPK turut berperan memperkuat tata kelola keuangan negara, antara lain melalui dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan menghitung kerugian negara sebesar Rp 71,57 triliun.

BPK juga mendorong penyelesaian berbagai permasalahan signifikan lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui sejumlah rekomendasi, di antaranya terkait perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, penyempurnaan formula penghitungan kompensasi listrik, serta perbaikan mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg. (tin,ist,bpk,rls/dya)

Poin-poin Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025:

- **Total penyelamatan Keuangan Negara:** BPK mencatat upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I tahun 2025.
- **Rincian permasalahan:** Angka tersebut terdiri atas tiga kategori permasalahan: Kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun. Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran sebesar Rp43,35 triliun.
- **Aksi tindak lanjut:** Dari total Rp69,21 triliun, sebagian telah ditindaklanjuti. Hingga November 2025, penyelamatan yang telah terealisasi melalui penyetoran ke kas negara, penyerahan aset, dan koreksi kelebihan pembayaran mencapai sekitar Rp1,04 triliun.
- **Cakupan Pemeriksaan** Jumlah laporan: IHPS I 2025 adalah ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK.

Ketika Perusahaan Negara 'Beranak-pinak' hingga Tujuh Turunan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap banyak perusahaan negara alias BUMN 'beranak-pinak' hingga melahirkan tujuh lapis anak usaha atau subsidiary.

Danantara kini berupaya untuk menata dan membatasi jumlah lapisan anak perusahaan pelat merah demi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.

"Ada tujuh layer (lapis). Saya setelah bekerja di Danantara baru paham sebutan layer itu. Dulunya, saya cuma paham kalau dari cucu-cicit (perusahaan)," kata Managing Director Holding Operasional Danantara Agus Dwi Handaya beberapa waktu lalu.

Agus mengatakan, sekarang ini total ada 1.045 BUMN, di mana 50 di antaranya memiliki 338 anak usaha. Dari 338 anak usaha ini muncul 585 cucu, serta 193 cicit perusahaan. Lalu, ada piut perusahaan 36, canggah 3, wareng 2 dan di level udheg-udheg ada 2 perusahaan.

Istilah yang disebut Agus mengacu pada silsilah keturunan keluarga di Jawa. Anak merupakan keturunan pertama, cucu keturunan kedua, cicit keturunan ketiga, piut keturunan keempat, canggah keturunan kelima, wareng keturunan keenam, serta udheg-udheg keturunan ketujuh.

"Tentunya dengan layering yang begitu banyak, mengakibatkan

pengelolaan operasional yang tidak efisien dan tidak kompetitif. Terjadi tumpang tindih dan kompetisi sesama BUMN, bahkan sesama BUMN dalam satu induk," kata Agus.

Danantara juga melihat banyaknya kasus mismanajemen dari situasi ini. Semisal, investasi pabrik senilai puluhan triliun yang tidak dilakukan dengan hati-hati dan cermat, mengakibatkan ketidakefisienan dalam proses produksi.

"Project management yang lemah mengakibatkan cost overrun atau project tertunda. Portofolio bisnis yang beragam di luar daripada core-nya sehingga tidak mampu bersaing secara kompetitif," katanya.

Lalu, subsidi harga yang strukturnya membuat insentif namun berakibat pada inefisiensi, terutama di BUMN sektor pupuk.

"Mismatch financing. Banyak sekali proyek-proyek investasi jangka panjang, tapi pembiayaannya berasal dari jangka pendek. Proses restrukturisasi dilakukan secara parsial, tidak menuntaskan," kata Agus.

Oleh karenanya, pemerintah melalui Danantara kini merasa perlu untuk melakukan restrukturisasi alias perampingan jumlah BUMN yang mencapai ribuan tadi, menjadi hanya sekitar dua ratusan saja. (ist,cnn/dya)

MEENDESAK, KOMISI III BENTUK PANJA REFORMASI POLRI, KEJAKSAAN DAN PENGADILAN

Komisi III DPR RI rapat bersama Polri dan Kejaksaan pada Selasa (18/11/2025). Hasil rapat, disepakati untuk membentuk panitia kerja (Panja) percepatan reformasi untuk tiga institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung. Dalam kesempatan itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui “rapor merah” yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri. Ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, mukai dari kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan secara berlebihan. Penegakan hukum dan pelayanan publik mendapat sorotan serius dari masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath mengatakan, panja ini dibuat untuk mempercepat proses reformasi tiga lembaga penegak hukum ini. Ia mengatakan, rapat panja nantinya akan turut memanggil ketiga kepala institusi tersebut untuk mendapatkan penjelasan.

“Nanti kita akan undang kembali untuk mendengar jawaban-jawaban yang tadi harus sudah dipersiapkan,” kata Rano.

“Mungkin yang hadir adalah Kapolri, Pak Jaksa Agung dan Pak Mahkamah Agung, mungkin salah satu hakim agung. Ini akan kita sepakati ya,” tambahnya.

Komisi III menuturkan, pembentukan panja ini adalah hal yang mendesak. Ini merupakan bentuk pengawasan Komisi III terhadapmitranya.

“Komisi III DPR RI menilai reformasi kepolisian RI, kejaksaan RI dan pengadilan sangat mendesak. Dan oleh karena itu akan menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan membentuk panitia kerja (Panja) Percepatan Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan,” kata Rano.

“Setuju ya?” tanya Rano yang dijawab “setuju” oleh para anggota Komisi III.

Wakapolri Bicara Kekerasan-Pungli

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, rapor merah kepolisian harus dilihat dari dua sisi perspektif yakni invert looking atau dari sisi internal, dan juga out of looking atau dari sisi masyarakat.

“Dari invert looking masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi baik itu kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan secara berlebihan,” ujar Dedi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Eks AsSDM Polri ini menilai, dari sisi kultural Polri harus berbenah. Salah satu pembenahan yang bisa dilakukan yakni memahami kondisi rakyat.



Suasana rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, Selasa (18/11/2025) di Gedung DPR RI. Ist

“Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri betul-betul harus betul-betul melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif,” ucapnya.

Dedi menekankan, citra Polri sangat dipengaruhi dari bagaimana cara melayani publik. Celakanya, ujung tombak Polri yang langsung bersentuhan dengan publik yakni Polsek, Polres dan Polda mayoritas

bermasalah.

“Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kalau ini bisa kita selesaikan maka 62% permasalahan polisi bisa kita selesaikan,” kata Dedi.

Wakapolri juga mengungkapkan

Menkum soal Putusan MK: Polisi Sudah Menjabat Tak Perlu Pensiun

SEMENTARA itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.

MK mewajibkan anggota Polri untuk pensiun atau mengundurkan diri bila bertugas di luar struktur.

Supratman mengatakan, putusan MK bersifat final. Namun, ia menilai tidak berlaku untuk yang sudah terjadi. Misal, saat ini sudah ada anggota Polri yang bertugas di luar struktur, mereka tidak perlu pensiun atau mengundurkan diri.

“Ini menurut saya, ya, menurut saya, terkait dengan putusan MK bersifat final. Tetapi menurut saya, yang sudah terjadi itu artinya tidak berlaku,” kata Supratman di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

“Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, kemudian, tapi

mereka tidak perlu mengundurkan diri karena kan mereka sebelum putusan MK mereka sudah menjabat itu,” jelas dia.

Politikus Gerindra ini mengatakan, masalah putusan MK ini akan dibahas dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sebab ada kementerian yang memang tugasnya bersinggungan dengan Polri.

“Nanti sebagai tim reformasi Polri juga nanti kita akan bicarakan menyangkut terkait kementerian mana sih yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian, di luar seperti yang ada sekarang,” ucap Supratman yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri ini.

“Kalau kayak BNN, BNPT, Kementerian Hukum, karena atau semua direktorat-direktorat di kementerian yang memiliki direktorat penegakan hukum

masih kurangnya pengawasan di internal Polri sehingga masih kurangnya pelayanan masyarakat oleh Polri.

“Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang abuse of power? Pengawasan kita kurangkan,” ujar Dedi.

Oleh karena itu, sebagai upaya perbaikan, lanjut Dedi, pihaknya akan memperbaiki hal tersebut khususnya dalam hal pelayanan publik.

“Apabila pelayanan publik kami baik karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kalau ini bisa kita selesaikan maka 62% permasalahan polisi bisa kita kami selesaikan,” ujarnya. (tin,ist,kum/dya)

Beberapa kasus terbaru dan yang menjadi sorotan publik di Indonesia yang melibatkan oknum polisi antara lain adalah:

- Kasus pemalsuan stiker VIP MotoGP (November 2025) Polres Mataram menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan pemalsuan stiker VIP MotoGP 2025.
- Oknum polisi melakukan catcalling di Jakarta Selatan (November 2025) Seorang oknum polisi melakukan catcalling terhadap wanita di Jakarta Selatan. Ia diperiksa oleh Propam dan mengaku hanya iseng.
- Oknum polisi membeli helm dengan bukti transfer palsu (November 2025) Oknum polisi tepergok membeli helm menggunakan bukti transfer palsu di Jawa Barat. Ia ditahan oleh Propam Polda Jawa Barat.
- Kasus pembunuhan polisi oleh polisi di Lombok Tengah (Oktober 2025) Brigadir Esco ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Briptu Rizka, istri korban, ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga korban menduga ada keterlibatan pihak lain dan menuntut polisi untuk menetapkan tersangka lainnya.

umpamanya,” tutur dia.

Supratman kembali menegaskan anggota Polri yang saat ini sudah bertugas di luar struktur, tidak perlu pensiun atau mengundurkan diri. Kecuali jika ditarik penugasannya.

“Tetapi untuk putusan MK sekarang, saya berpandangan bahwa itu sudah harus berlaku, tetapi bagi yang baru, yang diusulkan baru. Tapi yang sudah menjabat tidak perlu mengundurkan diri,” kata Supratman.

“Jadi teman-teman yang sementara menjabat sekarang, kecuali Polri menarik anggotanya. Itu lain persoalan,” tutur dia. (wid,ist/dya)

PEMERINTAH MAU KURANGI MASA TINGGAL JAMA'AH HAJI JADI 38 HARI

Di tengah gaduh soal redistribusi kuota, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengaku ingin memangkas waktu tinggal jama'ah haji Indonesia di Arab Saudi. Dia ingin masa tinggal di Saudi dikurangi dari 41 hari menjadi 38 hari. Sementara terkait kritikan terhadap perubahan kuota masing-masing wilayah, dia bersikukuh pembagian kuota haji berdasarkan waiting list sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Bahkan diklaim sebagai sistem yang paling adil untuk diterapkan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengurangi masa tinggal jama'ah haji di Arab Saudi menjadi sekitar 38 hingga 40 hari pada tahun 2026. Menteri Haji dan Umrah (Kemenhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa rencana ini merupakan pemendekan dari masa tinggal sebelumnya yang mencapai 41 hari.

"Ada kemungkinan 38, ada kemungkinan 39, ada yang 40. Kemarin kan 41 sampai 42. Kita kurangi dua hari dengan cara pengaturan penerbangan," ujar Irfan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Irfan mengatakan pengurangan masa tinggal bukan karena ada penambahan penerbangan. Pihaknya akan mengatur efisiensi penerbangan jama'ah haji.

"Kita atur lah supaya, tanpa menambah jumlah penerbangan, tapi kita atur efisiensi penerbangan," ucapnya.

Meskipun masa tinggal dipersingkat, ia memastikan bahwa pemangkasan tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan rukun haji. "Rukun haji tidak ada yang dipotong. Bahkan ibadah sunah seperti shalat wajib berjama'ah 40 kali di Masjid Nabawi tetap ada," tegas Irfan.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan masa tinggal jama'ah asal Indonesia di Arab Saudi selama 41 hari selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Masa tinggal jama'ah haji asal Indonesia itu ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi VIII dan pemerintah.

"Jumlah lama masa tinggal jama'ah di Arab Saudi rata-rata 41 hari," ujar Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat tersebut, Rabu (29/10/2025).

Selama pelaksanaan ibadah haji 2026, jama'ah haji asal Indonesia akan mendapatkan makan dengan jumlah yang berbeda di setiap lokasi. Selama di Madinah jama'ah akan makan sebanyak 27 kali, 84 kali makan selama di Mekah, lalu di di Arafah, Muzdalifah, dan Mina akan mendapatkan 15 kali makan.

"Menu katering untuk jama'ah haji harus berbahan baku dan bercita rasa Nusantara serta juru chef dari Indonesia," ujar Marwan.



Kebakaran melanda Gedung Musdalifah di Asrama Haji Transit Ternate, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, sekitar pukul 10.55 WIT, Selasa (18/11/2025).ist

Terkait akomodasi, jama'ah Indonesia akan ditempatkan di empat kawasan di Mekkah: Misfalah, Jarwal, Syisyah, dan Raudhah, dengan jarak terjauh 4.500 meter dari Masjidil Haram.

Di Madinah, akomodasi akan berada di kawasan Markaziyah, dengan jarak maksimal 1.000 meter

dari Masjid Nabawi. "Pelayanan akomodasi akan diberikan sepanjang jama'ah berada di Mekkah dan selama 9 hari 8 malam di Madinah," lanjut Irfan.

jama'ah haji 2026 dijadwalkan akan mulai masuk ke asrama haji pada 21 April 2026, dengan keberangkatan gelombang pertama pada 22 April

2026. Gelombang kedua akan dimulai pada 7 Mei 2026.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan pembagian kuota haji reguler berdasarkan daftar tunggu atau waiting list merupakan sistem yang paling adil untuk diterapkan di Indonesia.

Menurut Irfan, pembagian kuota haji berdasarkan waiting list juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. "Ketentuan baru ini memastikan bahwa setiap calon jama'ah mendapatkan kesempatan berangkat secara lebih adil dan terukur, sesuai dengan waktu pendaftaran," kata dia melalui keterangan resmi. (tun,ist,kcm/dya)

JADWAL LENGKAP PENYELENGGARAAN HAJI 2026

- uk asrama haji:
mulai 21 April 2026
- Pemberangkatan Gelombang I:
mulai 22 April 2026 menuju Madinah
- Pemberangkatan Gelombang II:
mulai 7 Mei 2026 menuju Jeddah
- Penutupan penerbangan haji di Jeddah:
21 Mei 2026
- Puncak ibadah haji:
diperkirakan 26 Mei 2026, menunggu
konfirmasi resmi Pemerintah Arab Saudi
- Pemulangan jemaah Gelombang I:
mulai 1 Juni 2026 dari Jeddah
- Pemulangan jemaah Gelombang II:
mulai 16 Juni 2026 dari Madinah
- Penutupan operasional pemulangan:
1 Juli 2026



Komisi VIII Soroti Syarat Istithaah

KOMISI VIII DPR menggelar rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah soal persiapan pelaksanaan haji 2026. Ada sejumlah hal yang disorot, dari soal kuota hingga akomodasi.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memulai rapat dengan menanyakan pembagian kuota jama'ah haji 2026.

"Penetapan jumlah jama'ah kuota yang berangkat per embarkasi. Bahwa pengisian kuota berdasarkan daftar tunggu namun demikian perlu sosialisasi. Perubahan komposisi termasuk daerah yang berkurang signifikan, daerah yang tiba-tiba bertambah jama'ahnya banyak, kesiapannya seperti apa," kata Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Kemudian penetapan pembagian kuota sudah ada keputusan atau belum? Keputusan siapa? Menteri atau wamen? Atau bahkan Sekjen atau dirjen?" sambung dia.

Marwan menambahkan, Komisi VIII DPR juga bertanya ke Menteri Haji Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan perihal pembagian embarkasi dan penerbangan.

"Komisi VIII ingin mengetahui juga per embarkasi menjadi berapa kloter, kloter pertama berapa jama'ah, kloter berikutnya berapa sesuai kapasitas pesawat," kata dia,

Selanjutnya, Marwan juga menyoroti soal istithaah haji. Bagaimana aturan detailnya. Sebab, di daerah sudah mulai ada jama'ah yang melakukan cek kesehatan untuk memenuhi syarat istithaah.

"Berikutnya istithaah kapan dilakukan penetapan dan dilakukan oleh siapa? Dan biaya pengecekan itu diputuskan berapa, dan beberapa tahun lalu jadi perdebatan juga. Kabupaten, kota, menerapkan kebijakan masing-masing dan ada yang memberikan jama'ah bahkan ada yang tak bisa melunasi, bahkan di tahap penetapan kesehatan mereka tidak bisa melunasi," urainya.

Marwan melanjutkan, hal yang perlu segera ditentukan adalah batas waktu pelunasan haji. Dan pihak mana yang bertanggung jawab terkait hal tersebut.

"Kapan pelunasan dimulai da berapa tahap? Karena belum tentu yang kita panggil ketentuan dia

berangkat bisa langsung melunasi, berapa tahap dan keputusan itu SK-nya siapa. Itu SK siapa, batas waktunya kapan? Batas waktu pelunasan, tentu batas waktu pelunasan sesuai dengan batas akhir dari Saudi menerima jama'ah," kata politikus PKB itu.

"Kalau masih ada jama'ah yang tidak bisa melunasi bagaimana caranya? Ke mana itu? Jangan sampai sia-sia kuota," tegasnya.

Marwan menambahkan, hal lain yang perlu segera dipastikan adalah terkait pemvisaan.

"Kemudian selanjutnya, pemvisaan itu kapan, kami juga ingin tahu jadwalnya kapan. Nanti supaya kita evaluasi kendalanya apa, jangan sampai terjadi seperti tahun lalu, kloter pertama setengahnya tidak keluar visa dan nusuk maka didorong kloter 2. Kapan dilakukan pemvisaan dan kapan terakhir per kloter," ungkapnya. (kum,wid/dya)

DUGAAN KORUPSI PROYEK WHOOSH MENGUAT TAK HANYA SOAL LAHAN, KPK ENDUS MARK UP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, termasuk penjualan kembali tanah milik negara kepada negara. Pengusutan dilakukan di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Terbaru, komisi anti-rasuah juga tengah menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan lahan proyek Whoosh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut jumlah tanah milik negara yang dijual kembali ke negara dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Selain soal tanah negara, KPK juga menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan lahan proyek Whoosh. “Ini masih terus didalami,” kata Budi.

KPK mengatakan pihak yang didalami dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan pihak yang tahu soal pengadaan lahan.

“Tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan untuk jalur kereta cepat tersebut,” ujar Budi.

Budi menjelaskan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut dilakukan karena saat ini KPK masih berfokus pada proses pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

“KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya, bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK sudah meminta keterangan kepada banyak pihak dalam progres penyelidikan kasus Whoosh.

“Tim juga melakukan pendalaman dan analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya, sehingga nanti bisa saling mendukung dan melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official,



(Ilustrasi) Petugas memeriksa PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).dok

mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.

Ia melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”

Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan

korupsi dalam proyek Whoosh.
Setelah itu, Mahfud MD dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh. (ist,ini,tin/dya)

UTANG DAN KEPEMILIKAN SAHAM WHOOSH

UTANG

- **Jumlah utang:**
 - 7,27 miliar dolar AS (setara Rp 118,37 triliun)
 - Kurs Rp 16.283 per dolar AS, termasuk pembengkakan biaya.
- **Cost overrun (pembengkakan biaya):**
1,2 miliar dolar AS
- **Bunga:**
2% per tahun

KEPEMILIKAN SAHAM

- **40% Konsorsium:**
Beijing Yawan HSR Co Ltd
(Perusahaan: CREC, CRRC, Sinohydro, CRSC, CRIC)
- **60% PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)**
Rincian :

KAI	Jasa Marga
58,53%	7,08%
Wijaya Karya	PTPN VIII
33,36%	1,03%

SUMBER :
Laporan Keuangan PT KAI Juni 2025.

Bos KCIC Serahkan Masalah Utang ke Danantara

STRUKTUR kepemilikan saham pada Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membuat tanggungan utang Whoosh secara otomatis ikut ditanggung ke empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Perusahaan patungan ini menggenggam 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sementara 40 persen lainnya dimiliki konsorsium perusahaan asal China.

Dalam tubuh PSBI sendiri, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi pemegang saham terbesar dengan porsi 58,5 persen, kemudian disusul Wika 33,4 persen, Jasa Marga 7,1 persen, serta PTPN VIII sebesar 1,03 persen. Dengan komposisi tersebut, setiap kerugian yang ditanggung PT KCIC otomatis akan memengaruhi laporan keuangan PSBI dan kerugiannya diteruskan ke masing-

masing BUMN pemegang saham.

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menyatakan pihaknya menyerahkan opsi restrukturisasi atau penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dwiyana memaparkan, alasannya karena pengelolaan KCIC berada di bawah naungan Danantara. Ia menegaskan bahwa apa pun mekanisme maupun skema penyelesaian utang kereta cepat akan diserahkan sepenuhnya kepada Danantara. “Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” katanya dikutip Selasa (17/11/2025) malam.

Dwiyana menyebut KCIC akan tunduk dan patuh pada keputusan

Danantara soal utang Kereta Cepat Whoosh. Adapun sebelumnya, Dwiyana juga menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Dwiyana.

Saat dikonfirmasi, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas aspek teknis operasional Whoosh, bukan terkait dengan isu utang kereta cepat tersebut yang belakangan santer diberitakan. “KCIC (membahas) pertemuan teknis,” ungkap Airlangga. (cnbc,ist/dya)

Jelang Nataru, Pemkot Malang Beri Subsidi Harga 50% untuk 6.000 Paket Sembako



Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi. (Santi/Lentera)

menjelang Nataru nanti ada kecenderungan harga bahan pokok naik," ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, ditemui di kegiatan Pasar Murah Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, pelaksanaan pasar murah pada November 2025 ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemkot menyalurkan subsidi untuk setiap paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula, dan bawang putih.

"Makanya kami mengantisipasi satu bulan sebelumnya dengan mengadakan pasar murah. Per paket

itu harga normalnya Rp200 ribu. Tetapi di sini kami subsidi 50 persen sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp100 ribu," jelasnya.

Menurut Eko, pihaknya menyiapkan 1.200 paket untuk masing-masing kecamatan, sehingga total 6.000 paket akan dibagikan di lima titik selama program berlangsung.

Eko menuturkan, sejumlah komoditas seperti beras, bawang putih, minyak goreng, dan gula memang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga di pasar. Karena itu, pasar murah digelar sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil menjelang libur akhir tahun.

Untuk mendukung program ini, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar. Eko menambahkan, intervensi lanjutan juga akan dilakukan bersama Bank Indonesia (BI) pada Desember mendatang dalam bentuk pasar murah tambahan. Guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

"Ketersediaan stok bahan pokok menurut saya masih cukup. Cuma

memang yang perlu diintervensi itu bagaimana pengendalian harganya, supaya tidak ada kenaikan yang signifikan," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, turut menegaskan pemerintah akan terus memantau kondisi harga di pasar. Ia membuka kemungkinan untuk kembali mengadakan pasar murah di dekat pasar tradisional, seperti yang pernah dilakukan tahun sebelumnya, guna menekan tingginya harga di tingkat pedagang.

Wahyu juga menyampaikan rencana kerja sama antar daerah untuk pengadaan bahan pokok dari wilayah lain yang memiliki harga lebih murah. Komoditas tersebut nantinya akan dijual melalui pasar murah dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar di Kota Malang.

Kehadiran pasar murah ini disambut baik warga yang hadir. Siti Rodiyah, warga Dinoyo, mengaku sangat terbantu dengan harga yang ditawarkan. "Alhamdulillah senang, karena harganya murah. Tadi saya beli dengan harga Rp100.000. Ini cukup membantu untuk kebutuhan rumah tangga," tuturnya. (Santi/Dya)

Buntut Belasan Dapur MBG Tak Beroperasi, DKP Kabupaten Malang Perkuat Komunikasi Cegah Proposal Terlambat

MALANG- Belasan dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang sempat berhenti beroperasi akibat keterlambatan pencairan anggaran.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang menegaskan akan memperkuat komunikasi dengan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Guna mencegah terulangnya keterlambatan pengiriman proposal yang menjadi salah satu penyebab terlambatnya pencairan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menjelaskan, penghentian layanan sementara terjadi karena anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair sesuai termin masing-masing SPPG. "Kan tidak sama semua. Jadi ada yang sudah cair, ada yang belum," ujarnya, dikonfirmasi melalui sambungan selular. Selasa (18/11/2025).

Meski demikian, Mahila mengaku hingga hari ini belum memperoleh

informasi terbaru mengenai status pencairan secara keseluruhan. Serta mana saja dapur SPPG yang telah beroperasi kembali. "Per hari ini saya belum tahu apakah sudah cair semua atau belum. Saya belum memonitor," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut keterlambatan pengiriman proposal oleh beberapa Kepala SPPG menjadi salah satu penyebab terhentinya operasional.

Mahila menanggapi hal tersebut dengan menyatakan, pihaknya akan segera melakukan komunikasi kembali dengan para pengelola SPPG. "Coba kami komunikasikan lagi, ya. Karena yang jelas ada hal-hal tertentu yang itu di luar kewenangan kami," katanya.

Dirinya menegaskan, seluruh proses pemberhentian hingga pencairan anggaran berada pada kewenangan BGN, sebab hubungan kerja berlangsung langsung antara BGN dan masing-masing SPPG. "Tidak ada tembusan bagi kami dan

sebagainya," ungkapnya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Sekreatris Satgas Percepatan SPPG Kabupaten Malang, ini menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mengumpulkan seluruh kepala SPPG bersama mitra dalam satu kegiatan koordinasi pada beberapa waktu lalu.

Ia menyebut kegiatan itu diharapkan dapat memperjelas pemahaman teknis para pengelola.

"Tetapi secara teknis kan mereka sendiri yang tahu, ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahila mengatakan tidak ada keluhan yang masuk terkait sulitnya pencairan anggaran. Meski begitu, ia sempat mengetahui adanya beberapa proposal yang diminta revisi oleh BGN sehingga

Ilustrasi: Aktivitas di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. (dok. dkp_malangkab)



proses pengajuannya menjadi lebih lama.

"Ada dulu SPPG yang sudah kirim ke BGN, itu ada yang diminta direvisi. Namun dari SPPG itu entah merevisinya yang terlalu lama atau bagaimana, sehingga sempat berhenti," jelasnya. (Santi/Dya)

PBB RESMI SAHKAN RENCANA TRUMP BENTUK PASUKAN DI GAZA

Dewan Keamanan (DK) PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung memuji hasil voting Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza usulannya. Trump mengklaim rencana tersebut akan mengarah pada "perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia."

Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut yang dinamai DK PBB 2803, menyatakan bahwa "kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina" jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza "telah maju".

Voting tersebut "mengakui dan mendukung DEWAN PERDAMAIAN, yang akan diketuai oleh saya," kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial miliknya, Truth Social.

"Ini akan tercatat sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan) akan mengarah pada perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia," imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

Melansir Associated Press (AP News), pemungutan suara pada Senin (17/11/2025) waktu setempat berlangsung dengan hasil 13-0. Sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut keputusan itu sebagai "bersejarah dan konstruktif," serta menandai arah baru bagi keamanan regional.

"Resolusi hari ini merupakan langkah penting menuju Gaza yang stabil dan memungkinkan Israel hidup dengan aman. Ini baru permulaan," ujarnya.

Resolusi AS ini mendukung rencana gencatan senjata 20 poin Presiden Donald Trump, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi dan pengerahan pasukan stabilisasi hingga akhir 2027. Mandat pasukan meliputi pengamanan wilayah, pengawasan perbatasan, dan proses demiliterisasi Gaza.

Negara-negara Arab sebelumnya menilai bahasa rancangan awal terlalu lemah terkait isu kenegaraan Palestina. AS akhirnya memperkuat teks resolusi, menyatakan bahwa setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi dan rekonstruksi Gaza berjalannya, akan tersedia "jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina." Washington juga menegaskan komitmen membangun dialog politik baru antara Israel dan Palestina.

Revisi tersebut memicu



Pemungutan suara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (17/11/2025) mengadopsi resolusi AS yang mendukung pembentukan pasukan stabilisasi internasional (international stabilization force/ISF) di Gaza. (rtr)

kemarahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kembali menolak opsi negara Palestina dan menilainya sebagai ancaman keamanan. Namun dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim,

termasuk Qatar, Mesir, UEA, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki, membantu mengamankan pengesahan resolusi ini.

Pemungutan suara dilakukan di tengah perhatian global terhadap

gencatan senjata Gaza yang masih rapuh setelah perang berkepanjangan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Serangan balasan Israel selama dua tahun telah menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan Gaza.

Rusia sempat mengedarkan resolusi tandingan yang lebih tegas mendukung negara Palestina dan menghapus rencana Dewan Perdamaian, tetapi usulan itu tidak berlanjut. Resolusi AS yang disahkan memberi pasukan stabilisasi kewenangan luas, termasuk penggunaan langkah-langkah militer "yang diperlukan" sesuai hukum internasional.

Pasukan juga akan bekerja bersama polisi Palestina terlatih serta berkoordinasi dengan Mesir dan Israel untuk mengamankan perbatasan dan aliran bantuan kemanusiaan. (gus,ana,afp,ap/dya)

POKOK-POKOK KEPUTUSAN RESOLUSI TERSEBUT:

- DK PBB menyetujui pembentukan Dewan Perdamaian untuk memimpin rekonstruksi Gaza.
- Mandat Dewan Perdamaian berlaku sampai akhir 2027.
- Reformasi PA dan rekonstruksi jadi dasar menuju negara Palestina.
- Bantuan kemanusiaan wajib terkoordinasi dan digunakan untuk tujuan damai.
- Entitas operasional berada di bawah Dewan Perdamaian dan dibiayai donor sukarela.
- Bank Dunia didorong membentuk dana rekonstruksi Gaza.
- Dibentuk Pasukan Stabilitas Internasional dengan komando terpadu.
- Tugas pasukan: pelucutan senjata, perlindungan warga, pelatihan kepolisian.
- Pasukan menjaga koridor bantuan.
- Israel menarik pasukan bertahap sesuai kesepakatan.
- Negara anggota diminta memberi dukungan dana, logistik, dan tenaga ahli.
- Dewan Perdamaian melapor ke DK setiap 6 bulan.
- Boleh membentuk entitas operasional untuk transisi pemerintahan Gaza.



merupakan urusan internal nasional yang tidak bisa dipisahkan dari jalur politik menuju kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina.

Mereka juga menolak segala bentuk pengawasan bantuan kemanusiaan yang menjadikan operasi kemanusiaan tunduk pada pemerasan politik atau mekanisme kompleks. Hamas menyerukan pembukaan jalur lintas secara permanen dan menuntut PBB serta UNRWA memimpin respons atas bencana kemanusiaan di Gaza. (afp,ist/dya)

Hamas Tolak Pasukan Stabilisasi

GERAKAN Perlawanan Islam (Hamas) secara tegas menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengadopsi rencana Amerika Serikat terkait pembentukan pemerintah transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.

Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut bahwa resolusi tersebut tidak memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza yang telah mengalami dua tahun perang genosidal dan kejahatan luar biasa oleh pendudukan Israel.

"Resolusi ini memberlakukan mekanisme perwalian internasional atas Gaza, yang ditolak oleh rakyat dan faksi-faksi kami. Resolusi ini juga memberlakukan mekanisme untuk mencapai tujuan pendudukan, yang gagal mereka capai melalui genosida brutal. Lebih jauh lagi, resolusi ini mencabut Jalur Gaza dari geografi Palestina dan mencoba memaksakan realitas baru yang bertentangan dengan prinsip dan hak nasional rakyat kami. Ini merampas hak kami atas penentuan nasib sendiri dan pendirian negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," tegas Hamas dalam siaran pers, Selasa (18/11/2025).

Resolusi tersebut, yang disahkan

dengan 13 suara setuju dan dua abstain dari Rusia dan China, mengizinkan pembentukan otoritas transisi "Dewan Perdamaian" dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Melansir CNN, Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz menyatakan bahwa ISF akan menjadi koalisi penjaga perdamaian yang dipimpin negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, dan bertugas mengamankan Gaza, melucuti senjata, melindungi warga sipil, serta mengawal bantuan.

Namun, Hamas menilai bahwa memberi mandat kepada pasukan internasional untuk menjalankan peran di dalam Gaza, termasuk pelucutan senjata perlawanan, akan menghilangkan netralitasnya dan menjadikannya bagian dari konflik.

"Setiap pasukan internasional, jika dibentuk, harus dikerahkan hanya di perbatasan untuk memantau gencatan senjata dan menyalurkan bantuan, bukan menjadi otoritas keamanan yang memburu rakyat kami dan perlawanan kami," tegas Hamas.

Lebih lanjut, Hamas menyatakan bahwa senjata perlawanan berkaitan langsung dengan keberadaan pendudukan, dan isu tersebut

UBI DAN KULITNYA KINI JADI PRIMADONA GIZI

Di banyak dapur Nusantara, ubi jalar selama ini hadir sebagai bahan pangan sederhana, kadang direbus ketika pagi masih berkabut, kadang dipanggang ketika sore menurun. Namun, di balik kesahajaannya, umbi satu ini tengah menapaki panggung popularitas global. Para ahli gizi, peneliti pangan, hingga pemerhati kesehatan mulai menempatkan ubi pada barisan sumber nutrisi terbaik, terutama ketika dikonsumsi lengkap bersama kulitnya.

Kulit ubi yang dulu sering dibuang begitu saja, kini justru diakui sebagai bagian paling berharga dari sang umbi.

Dari berbagai penelitian yang dikutip media internasional hingga riset lokal, semakin jelas bahwa ubi, baik yang ungu, kuning, maupun putih, menawarkan komposisi nutrisi yang kuat. Satu buah ubi panggang berukuran besar, lengkap dengan kulitnya, menghadirkan serat hampir 6 gram, protein, vitamin A dalam jumlah sangat tinggi, serta kalium, magnesium, dan kalsium. Kulitnya menambah suplai vitamin C, zat besi, zinc, dan folat, menjadikannya paket yang utuh untuk mendukung metabolisme tubuh.

Dibanding ubi yang direbus setelah dikupas, ubi yang dimasak dengan kulit mempertahankan jauh lebih banyak mikronutrien penting, sekaligus menjaga ketahanan seratnya.

Keunggulan itu juga berhubungan dengan cara memasak. Teknik memanggang, mengukus, atau menggunakan air fryer dinilai paling mampu menjaga struktur nutrisi umbi tanpa merusak komponen bioaktifnya. Para ahli sepakat, proses pemanasan yang tidak terlalu agresif bisa mengurangi antinutrien seperti oksalat sekaligus mempertahankan antioksidan alami, termasuk antosianin yang melimpah pada ubi ungu.

Senyawa antosianin inilah yang bekerja menetralkan radikal bebas, meredakan inflamasi, dan mencegah stres oksidatif. Tiga faktor yang kerap berkaitan erat dengan penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi β -karoten, likopen, dan antosianin dalam ubi memiliki efek provitamin

A dan antioksidan yang kuat. Keduanya berperan dalam menjaga ketajaman penglihatan, mendukung fungsi retina, serta menurunkan risiko penyakit kardiovaskular melalui mekanisme penurunan kolesterol dan peningkatan kesehatan dinding pembuluh darah.

Maka tak mengherankan jika konsumsi ubi, terutama bersama kulitnya, dianggap sebagai bagian dari pola makan tinggi serat dan tinggi fitonutrien yang mampu membantu menjaga kesehatan jantung dan metabolisme tubuh.

Selain itu, kulit ubi menjadi sumber serat pangan dengan kualitas yang istimewa. Serat ini bekerja sebagai prebiotik yang memberi makan bakteri baik di usus. Saat bakteri usus memfermentasi serat tersebut, mereka memproduksi asam lemak rantai pendek, senyawa yang terbukti mendukung kesehatan lapisan usus dan membantu mengurangi risiko gangguan gastrointestinal.

Berbagai studi menegaskan bahwa peningkatan asupan serat dari kulit ubi bisa memperbaiki komposisi mikrobioma usus, membuat pencernaan lebih efisien, serta meminimalkan kemungkinan sembelit. Di banyak literatur nutrisi, diet kaya serat juga dikaitkan dengan penurunan risiko kanker kolon—sebab saluran cerna yang baik adalah fondasi kesehatan keseluruhan.

Ragam manfaat ubi jalar tidak berhenti pada usus dan mata. Kandungan senyawa fitokimia seperti karotenoid, tanin, flavonoid, hingga tokoferol memperkuat sistem imun tubuh. Fitokimia ini bekerja saling melengkapi, menciptakan benteng alami yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Di sisi lain, ubi jalar, terutama varietas ungu, menyimpan potensi antikanker.

Penelitian yang dikembangkan sejumlah akademisi menunjukkan antosianin dalam ubi ungu mampu menghambat perkembangan berbagai jenis sel kanker, termasuk leukemia, kanker hati, kanker usus, dan kanker payudara.

Ekstrak ubi ungu dinilai dapat melindungi sel pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif, yang menjadikannya kandidat potensial dalam penanganan dini diabetes melitus. Kemampuan ubi mendukung pengelolaan gula darah juga telah lama dibahas.

Kandungan antosianin membantu mengurangi resistensi insulin dengan mekanisme menurunkan stres retikulum endoplasma dan memperbaiki respons sel terhadap glukosa. Senyawa ini juga berperan mengembalikan kadar gula darah ke rentang normal pada penelitian hewan uji. Meskipun penelitian lebih luas masih diperlukan, banyak ahli menempatkan ubi jalar ungu sebagai salah satu pangan lokal yang potensial dijadikan alternatif sehat untuk penderita diabetes.

Mampu Lindungi Kulit

Di ranah kesehatan kulit, ubi jalar pun memainkan peran penting. Beta karoten yang terkandung di dalamnya mampu menyerap radiasi sinar matahari dan melindungi kulit dari

kekeringan, bintik penuaan, serta kerusakan akibat paparan UV.

Setelah dicerna, beta karoten dikonversi menjadi vitamin A, salah satu nutrisi yang membantu pembentukan kolagen, komponen kunci yang menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit. Inilah alasan mengapa konsumsi ubi disebut-sebut sebagai cara sederhana namun efektif untuk mempertahankan kesehatan kulit dari dalam. (tin, ind, ist/dya)

MANFAAT UBI & KULITNYA

1. Manfaat untuk Usus

- Mengurangi risiko sembelit
- Menurunkan risiko kanker kolon
- Menjaga kesehatan lapisan usus

2. Kebaikan untuk Mata

- Mendukung fungsi retina
- Mencegah xerophthalmia
- Melindungi mata dari degenerasi sel

4. Mendukung Kesehatan Jantung

- Antioksidan menurunkan inflamasi
- Serat membantu menurunkan kolesterol
- Menjaga elastisitas pembuluh darah
- Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular

5. Potensi Anti-Diabetes

- Antosianin membantu menurunkan resistensi insulin
- Menurunkan stres oksidatif & stres retikulum endoplasma
- Berpotensi menormalkan kadar gula darah
- Melindungi sel pankreas dari kerusakan



PERINGATAN FBI: JANGAN PAKAI 'CHARGING STATIONS' GRATIS

Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (AS) FBI memberi peringatan atas penggunaan fasilitas pengisian baterai ponsel gratis (charging stations) di ruang publik. FBI mengungkapkan penjahat berhasil membajak fasilitas umum tersebut dan dapat menginfeksi dengan malware.

Berkat kemajuan zaman, kini di tempat umum sudah banyak tersedia charging station (stasiun pengisian daya) gratis, seperti di mal, stasiun kereta, hotel, kampus, hingga bandara.

Kendati demikian, terlepas dari kemudahan yang diberikannya, charging station yang ada di tempat umum bisa membahayakan HP, khususnya charging station dengan model port USB. Pasalnya, port USB memiliki risiko tinggi menjadi tempat penyebaran virus malware atau malicious software, sehingga tidak aman untuk melakukan charge HP di tempat umum dengan charging station. Bahkan pihak Federal

Bureau of Investigation (FBI) pun telah memperingatkan akan bahaya dari melakukan charge HP di tempat umum.

"Hindari menggunakan stasiun pengisian gratis di bandara, hotel, atau pusat perbelanjaan," melansir cuitan FBI Denver.

"Penjahat telah menemukan cara untuk menggunakan port USB publik untuk memasukkan malware dan perangkat lunak pemantauan ke perangkat. Bawa pengisi daya dan kabel USB Anda sendiri dan gunakan stopkontak listrik sebagai gantinya," tambahnya.

FBI menawarkan panduan serupa di situs webnya untuk menghindari fasilitas charging umum tersebut. Namun buletin itu tidak menunjukkan contoh kerugian konsumen dari pembajakan tersebut.

Komisi Komunikasi Federal (FCC) juga telah memperingatkan tentang "juice jacking" ini sejak 2021 lalu. Pada saat itu FCC memperingatkan bahwa perangkat konsumen dengan kabel USB dapat dibajak melalui perangkat lunak yang kemudian dapat menyedot nama pengguna dan kata sandi.

"Komisi mengatakan kepada konsumen untuk menghindari fasilitas publik tersebut," tulisnya.

Peringatan dari FBI tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa di dunia yang digerakkan oleh teknologi ini tetap harus memperhatikan kenyamanan

ketika mengisi daya HP di ruang publik. Selain itu, bahaya lain yang bisa terjadi dari mengisi daya HP di tempat umum adalah terkena praktik "Juice Jacking".

Juice Jacking adalah serangan keamanan pada perangkat yang terhubung melalui USB. Serangan tersebut bisa berupa malware yang dipasang melalui port USB yang rusak oleh aktor jahat. Sehingga mereka dapat mengunci perangkat atau mengeksport data pribadi serta kata sandi pengguna charging station. Setelah itu, aktor jahat tersebut akan menggunakan informasi korbannya untuk mengakses akun online atau menjualnya ke aktor jahat lainnya.

Melansir dari FCC, ada beberapa tips untuk mencegah Juice Jacking. Pertama, gunakan baterai eksternal atau power bank pribadi. Kemudian, pertimbangkan untuk membawa kabel khusus pengisian daya agar bisa mencegah pengiriman atau penerimaan data saat mengisi daya.

Google Ingatkan Bahaya WiFi Publik

Tak hanya tempat pengisian daya, hampir di semua tempat publik seperti restoran hingga bandara memiliki jaringan wifi. Namun Google mengingatkan pengguna HP Android untuk tak menggunakannya.

Larangan itu diungkapkan Google dalam laporan Behind the Scenes yang terbit Oktober 2025. Salah satu yang dibahas adalah adanya 94% pengguna Android berisiko menjadi korban serangan pesan teks, yang membuat kerugian

finansial dan tekanan emosional pada para korbannya.

Laporan itu juga mengungkapkan 73% responden khawatir soal penipuan seluler dan 84% responden mengatakan penipuan sleuler berbahaya untuk masyarakat. Google terkait kekhawatiran itu memberikan tips untuk membuat pengguna jauh lebih aman. Yakni dengan menghindari menggunakan Wifi publik.

Phone Arena menuliskan serangan man-in-the-middle bisa terjadi pada mereka yang menjadi korban Wifi publik palsu mirip dengan jaringan asli. Ini adalah gangguan pada komunikasi antar ponsel dan server yang disambungkan seperti situs web bank.

Peringatan Google ini sebelumnya juga pernah diutarakan oleh Transportation Safety Administration (TSA). Lembaga itu mengingatkan menghindari Wifi publik dan stasiun pengisian daya umum.

Ada beberapa cara untuk menghindari kejahatan tersebut. Pertama, pakai Virtual Private Network (VPN) yang aman. Kemudian, jelajahi situs hanya yang menggunakan ikon gembok di awal bilah dan alamat situs dengan 'https'.

Sebaiknya, periksa lebih dulu Wifi sebelum benar-benar menghubungkannya. Pastikan memang terhubung dengan jaringan resmi pada lokasi publik yang Anda kunjungi. Jangan lupa, matikan koneksi otomatis ke Wifi publik atau jaringan yang tidak dikenal. Hati-hati dengan gadgetmu. (ist,fbi,gog/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KETAHUI 6 MACAM SPONS MAKEUP DAN CARA PAKAINYA

Di tengah banyaknya bentuk, tekstur, dan fungsi yang ditawarkan, memahami jenis-jenis spons makeup bisa membuat proses merias wajah terasa jauh lebih mudah. Wajar jika alat kecil ini kini menjadi barang wajib bagi para beauty enthusiast. Tidak sekadar pelengkap, spons memegang peran penting dalam menciptakan riasan yang halus, merata, dan tampak natural di kulit. Dengan memilih yang tepat, hasil akhir makeup bisa berubah drastis, lebih flawless, lebih nyaman, dan lebih sesuai dengan gaya riasan yang kamu inginkan.

Spons makeup atau makeup sponge kini menjadi salah satu alat kecantikan yang wajib dimiliki oleh para beauty enthusiast. Bukan tanpa alasan, spons memiliki peran penting dalam menghasilkan riasan yang halus, merata, dan tampak natural di kulit.

Alat ini mampu menyerap kelebihan produk, meratakan foundation di area kering, sekaligus memberikan hasil akhir menyerupai kulit asli. Menurut makeup artist selebriti Kasey Spickard, penggunaan spons yang tepat dapat memberikan hasil makeup sempurna tanpa harus menggunakan banyak produk.

Meski terlihat serupa, ternyata ada banyak jenis spons makeup dengan fungsi yang berbeda-beda. Setiap bentuk spons dirancang untuk membantu aplikasi produk tertentu, mulai dari foundation cair hingga bedak padat.

Pemilihan spons yang tepat bisa memengaruhi hasil akhir riasan. Tak hanya itu, bahan spons pun turut menentukan kenyamanan pengguna, terutama bagi kamu yang memiliki kulit sensitif.

Spons berkualitas baik biasanya terbuat dari material latex-free yang lembut dan tidak menimbulkan iritasi. Kini berbagai merek kosmetik menawarkan beragam jenis spons dengan bentuk, ukuran, dan tekstur yang bervariasi.

Mulai dari spons berbentuk teardrop yang populer hingga wedge yang sering digunakan oleh para profesional. Untuk mendapatkan hasil maksimal, penting mengetahui macam-macam spons makeup dan kegunaannya.

Teardrop Shaped Sponge

Spons berbentuk tetes air atau teardrop merupakan jenis yang paling umum dan banyak digunakan. Bentuknya menyerupai

telur dengan ujung runcing memudahkan pengguna menjangkau area sulit seperti sisi hidung, bawah mata, dan tulang pipi. Sementara bagian bawah yang membulat digunakan untuk meratakan foundation di area wajah yang lebih luas. Menurut Spickard, spons jenis ini cocok untuk semua jenis produk berbentuk cair, krim, maupun bedak.

Terbuat dari bahan latex-free, spons ini aman untuk kulit sensitif dan mampu memberikan hasil riasan yang halus serta menyatu dengan kulit secara alami.

Round Disc Sponge

Spons ini sering ditemukan dalam kemasan bedak padat atau compact powder. Bentuknya yang pipih dan bulat membuatnya ideal untuk mengaplikasikan bedak ke seluruh wajah. Meskipun tidak memberikan hasil presisi seperti lainnya, spons bulat datar unggul dalam meratakan produk dengan cepat. Namun perlu diperhatikan kebersihannya.

Spons jenis ini mudah menyerap produk sehingga sebaiknya dicuci secara rutin agar tidak menumpuk sisa bedak yang bisa menyebabkan jerawat atau kulit kusam.

Pear Shaped Sponge

Spons berbentuk buah pir memiliki sedikit lekukan di bagian tengah yang berfungsi sebagai pegangan agar tidak mudah tergelincir saat digunakan. Bentuk ini membantu memberikan kontrol lebih baik saat meratakan foundation atau concealer.

Selain itu, pengguna dapat menyesuaikan tingkat

ketebalan aplikasi di area tertentu, misalnya menutupi noda hitam atau kemerahan. Spons ini sangat direkomendasikan bagi pemula karena mudah digunakan dan memberikan hasil akhir halus.

Flat Edge Sponge

Macam-macam spons makeup dan kegunaannya ada yang jenis dengan satu sisi datar dan lainnya bulat. Bagian tepi datar berguna untuk mengaplikasikan produk dengan lebih presisi, seperti saat ingin membuat contour di tulang pipi atau menambahkan highlighter.

Sementara bagian bulatnya tetap berfungsi untuk membaurkan produk di area yang lebih luas. Spons ini populer di kalangan pengguna yang ingin hasil riasan profesional tanpa harus menggunakan banyak alat tambahan.

Wedge Sponge

Spons berbentuk segitiga atau wedge banyak digunakan oleh para makeup artist profesional karena praktis dan higienis. Spons ini umumnya sekali pakai (disposable) sehingga cocok untuk penggunaan di klien yang berbeda.

Keunggulan lainnya memiliki bentuk sudut tajamnya yang memudahkan aplikasi di area sempit, seperti sudut mata dan hidung. Spons wedge sering dipakai untuk mengaplikasikan foundation dan concealer sehingga memberikan hasil merata dan presisi.

Thick Oval Sponge

Spons oval tebal memiliki ukuran lebih besar dan tekstur yang padat. Jenis ini cocok digunakan untuk produk bertekstur krim atau cair yang kental seperti

cream maupun stick foundation.

Dengan daya serap tinggi, spons ini membantu meratakan produk berat tanpa membuat hasilnya terlihat cakey. Spons oval tebal juga bisa digunakan untuk membaurkan produk dengan sempurna, menghasilkan tampilan yang lembut dan tahan lama.

Setelah memahami macam-macam spons makeup, pilih bentuk yang tepat sesuai jenis produk dan hasil yang diinginkan. Spons besar dan bulat cocok untuk aplikasi dasar seperti foundation, sementara spons kecil ideal untuk area bawah mata dan noda kecil. (ist, wid/dya)

10 CARA MEMBERSIHKAN BEAUTY BLENDER

1. Sabun lembut Basahi dengan air hangat, beri sabun cair, pijat lembut.
2. Rendam air hangat Membantu melonggarkan kotoran & sisa makeup.
3. Pembersih sikat Oleskan cleanser, pijat dengan jari agar kotoran terangkat.
4. Campuran minyak zaitun + sabun 2 bagian minyak zaitun + 1 bagian sabun cuci piring untuk kotoran membandel.
5. Metode microwave Rendam dalam air, panaskan 30–60 detik untuk membunuh bakteri.
6. Pembersih khusus beauty blender Dirancang untuk membersihkan sekaligus men-sanitasi.
7. Sabun batang Gosokkan ke spons, pijat, lalu bilas hingga bersih.
8. Deterjen pakaian Campur sedikit deterjen dengan air hangat, rendam beberapa menit.
9. Larutan cuka Campur air + cuka 1:1, rendam beberapa jam, lalu bilas.
10. Keringkan dengan benar Jangan simpan dalam wadah tertutup; biarkan mengering di udara bebas.



Pembangunan Koperasi ...dari hal 1

Desain dan biaya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 1,6 miliar per unit menjadi sorotan. Komisi VI DPR RI meragukan 80.000 Kopdes Merah Putih akan dibangun dengan desain yang telah dibuat tersebut.

Cecaran datang di tengah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memperlihatkan desain dari bangunan fisik Kopdes Merah Putih. Hal ini terjadi saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara, Selasa (18/11/2025).

Mulanya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Aimah Nurul Anam yang mempertanyakan berapa anggaran pembangunan. "Biaya satu gedung berapa pak?," tanya Mufti.

Kemudian Joao langsung menjawab, biaya pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih mencapai Rp 1,6 miliar. Ia mengklaim harga tersebut cukup rasional.

"Satu gedung KDMP ini kita menganggarkan Rp 1.658.000.000, kurang lebih sekitar Rp 2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia. Menurut kami itu harga yang rasional," tuturnya.

Ia menyebut perbedaan biaya per meter di tiap wilayah menjadi pertimbangan utama. "Karena di Papua itu anggaran per meternya itu sekitar Rp24 ribu. Di daerah-daerah Sumatera atau di daerah-daerah NTT itu bisa sekitar Rp12 ribu, di daerah-daerah tertentu. Hanya di Jawa yang sekitar Rp1 jutaan," sambung dia.

Mufti menilai rancangan bangunan senilai Rp1,6 miliar untuk satu gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terlalu mewah.

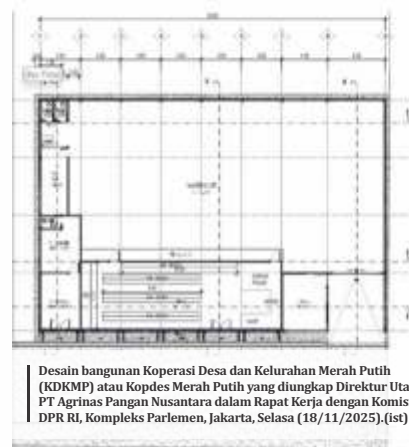
"Saya melihat, mengamati tentang konsep total ruang yang dibuat oleh Pak Direktur Agrinas. Bagi saya ini pemborosan biaya Pak. Rp1,6 miliar untuk target storage, untuk masalah tempat penjualan atau lokal di desa itu... ini bagus, tapi terlalu mewah bagi saya kalau untuk tingkat desa, apalagi wujud yang ingin kita lakukan itu adalah koperasi Pak," kata Mufti dalam kesempatan yang sama.

Mufti juga mempertanyakan efektivitas desain ruangan jika nantinya digunakan untuk penyimpanan hasil pangan yang mudah rusak.

"Nah, sekarang tata ruang yang ada Rp1,6 miliar ini kan yang akan ditampung itu adalah pangan, hasil pangan. Nah kalau bicara hasil pangan, dalam waktu 2 hari saja sudah membusuk. Nah kalau dibuat

lantara
nesia

Desain KDKMP



Desain bangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih yang diungkap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (ist)



konsepnya seperti ini, jangan sampai 2 hari Pak, sehari sudah busuk Pak," ujarnya.

Menurut Mufti, kebutuhan utama koperasi desa justru ruang pendingin. "Jadi interior daripada ruangan itu harus cold storage, pendingin Pak. Ruang pendingin yang harus ada di dalam, bukan konsep seperti ini," lanjut dia.

Ia meminta agar desain bangunan dipangkas menjadi lebih sederhana agar efisiensi anggaran tercapai.

"Nah daripada anggaran itu Rp1,6 miliar, mendingin Bapak buat budget Rp500 juta, target pencapaiannya bisa lebih maksimal, konsepnya lebih

diminimalis, jangan terlalu sebesar ini. Karena cost anggaran itu saya lihat, untuk target maksimal yang dicapai, itu nggak bisa tercapai Pak, dengan anggaran seperti itu," tegasnya.

Menurut Joao, pembangunan fisik ditargetkan bisa dimulai lebih masif pada awal tahun depan. Lahan yang telah siap akan langsung dikerjakan pada Januari-Februari 2026.

Bangunan Koperasi Merah Putih dirancang berukuran 20 x 30 meter, dilengkapi fasilitas terpadu seperti toko desa, klinik, gudang pupuk, serta ruang penyimpanan gas subsidi.

Setiap koperasi juga akan diperkuat armada operasional berupa

satu truk, satu mobil pick up 4x4, dan dua motor roda tiga.

Lalu dilanjutkan dengan Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nurdin Halid mempertanyakan apakah semua Kopdes Merah Putih akan dibangun sesuai yang telah didesain. Ia meragukan karena khawatir desain tersebut tidak merata untuk 80.000 Kopdes Merah Putih.

"Pertanyaan saya apakah akan dibangun gerai seperti ini?" tanya dia.

"Betul," jawab Joao.

"Mohon dipertimbangkan Pak Menteri, Pak Dirut, jangan sampai jadi kandang kambing. Karena ada desa pak penduduknya 500 atau 100, atau 1.000 dan itu rumahnya berjauhan. Itu nggak mungkin yang kampungnya jauh itu jaraknya 5 km, 3 km (dari Kopdes) belum tentu saja mau datang belanja. Pengalaman dulu, bangun gudang pupuk 30 ton, jadi kandang kambing," jawab Nurdin.

Nurdin Halid juga menyoroti kebijakan pemerintah yang memanfaatkan dana desa sebagai jaminan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (ant,ktn,gus/dya)

Menkop: 30.500-an Titik Tanah Siap

MENTERI Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyebutkan, pemerintah menyiapkan 30.500 lokasi untuk gerai dan gudang Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Informasi itu disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi (Kemkop) dan PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Tercatat per hari ini, sekarang 30.500-an titik tanah yang siap untuk dibangun," kata Ferry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry mengatakan, pihaknya mendapatkan data tanah itu, dan Kemkop akan segera menyerahkannya kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk dibangun.

Adapun PT Agrinas Pangan Nusantara mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih. "Untuk segera dibangun," ujar Ferry. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, setiap hari pihaknya menargetkan inventarisasi 1.000

titiktanah.

Kebijakan itu juga dilakukan dalam rangka mewujudkan keinginan Prabowo agar 80.000 Kopdes Merah Putih selesai dibangun dan bisa beroperasi pada Maret atau April 2026. "Kami menargetkan 1.000 titik setiap hari, jadi tugas yang tidak ringan juga," kata Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan pihaknya telah memetakan lebih dari 30 ribu sebaran titik tanah yang sudah siap dibangun Kopdes Merah Putih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.433 di antaranya berada di Jawa Timur, 4.384 di Jawa Tengah, 3.111 di Jawa Barat, dan 1.018 di Sumatra Selatan. Lalu, 1.016 di Riau, 1.615 di Sumatra Utara, 1.482 di Aceh, 668 di Kalimantan Tengah, 866 di Nusa Tenggara Barat (NTB), 1.092 di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 758 di Sulawesi Selatan.

"Ini bisa dilihat di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes)," tutur Ferry.

Sebagaimana diketahui, Prabowo telah meminta sejumlah anak

buahnya di Kabinet Merah Putih untuk mengebut pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia memerintahkan agar pembangunan gerai dan gudang dilakukan PT Agrinas Palma Nusantara dibantu TNI.

Adapun tanah yang digunakan merupakan aset pemerintah setempat. Untuk mengejar target itu, Kemkop mengubah skema pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih.

Dalam paparannya, Ferry menjelaskan pihaknya telah merekrut dan melatih 7.867 asisten bisnis yang akan menjadi pendamping utama dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Setiap asisten disiapkan untuk mendampingi 10 koperasi desa, mulai dari penyusunan rencana bisnis, administrasi, hingga memastikan operasional berjalan dengan baik.

"Nanti setiap satu asisten bisnis diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia," tutur Ferry. (wid,ist,kum/dya)

BURUH TEGASKAN DEMO MASSAL 22 NOVEMBER

Tolak Hitungan Kenaikan UMP 2026 Versi Kemnaker: Sekitar 3,5%

Ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia akan menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 berkisar 6,5-10,5 persen. Aksi demo itu akan dilakukan 22 November atau sehari setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan kenaikan UMP 2026 pada 21 November mendatang.

Gerakan buruh nasional memastikan akan menggelar aksi besar pada 22 November 2025, sehari setelah pengumuman UMP 2026 oleh pemerintah. Koalisi serikat pekerja menuntut kenaikan minimal 6,5 persen hingga 10,5 persen, menilai formula Kementerian Ketenagakerjaan hanya menghasilkan kenaikan sekitar 3,75 persen, jauh di bawah kebutuhan hidup pekerja.

"Koalisi Serikat Pekerja, dan Partai Buruh, termasuk KSPI, akan menggelar dua aksi besar. Aksi pertama tanggal 22 November 2025 ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia kota-kota industri akan turun ke jalan tanggal 22 November, ratusan ribu buruh di seluruh kota-kota industri di Indonesia turun ke jalan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers secara online, Selasa (18/11/2025).

Said mengungkapkan aksi demo ini sebagai bentuk penolakan terhadap perhitungan kenaikan UMP 2026 oleh Kemnaker.

Berdasarkan informasi yang diterima Said dari Dewan Pengupahan, Kemnaker akan menggunakan indeks tertentu 0,2 dan akan membuat UMP 2026 hanya naik 3,75 persen atau berkisar Rp100 ribu saja.

"Dengan menggunakan rumus Menaker, indeks tertentu 0,2, inflasi 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, maka ketemu kenaikan upah minimum hanya 3,75 persen. Kenaikan upah nilainya di bawah pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,12 persen," ucapnya.

Di Jakarta, kata Said, unjuk rasa akan dipusatkan di Istana Negara atau Gedung DPR RI. Ia juga mengklaim aksi demo ini akan melumpuhkan kota-kota industri.

"Begitu (UMP) diumumkan oleh Menaker, maka 22 November serentak seluruhnya buruh aksi besar-besaran. Lumpuh itu kota-kota industri, dalam artian lumpuh karena masyarakat turun ke jalan," ujarnya.

Menaker Yassierli sendiri belum membocorkan besaran indeks tertentu maupun kenaikan UMP 2026. Ia meminta pekerja sabar karena hal itu baru akan diumumkan pada 21 November mendatang.

"Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh dan dari teman-teman



(Ilustrasi) Formula UMP Kementerian Ketenagakerjaan hanya menghasilkan kenaikan sekitar 3,75 persen, jauh di bawah kebutuhan hidup pekerja. (Dok.ist)

pengusaha Apindo. Tunggu saja," ujar Yassierli di kantornya, Rabu (12/11/2024) lalu.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diperkirakan molor, atau tidak diumumkan pada 21 November 2025 mendatang, seperti

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan aturan tersebut, UMP tahun berikutnya harus diumumkan paling lambat 21 November dan UMK paling lambat 30 November. Bila

Apindo Sebut Naik 7,77% Tak Masuk Akal

DESAKAN serikat buruh agar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik hingga 7,77% mendapat penolakan keras dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai usulan tersebut tidak realistis karena menggunakan indeks tertentu atau alpha yang terlalu tinggi, yakni 0,9 hingga 1,4.

Berdasarkan perhitungan buruh, jika alpha berada di angka 1,0, maka kenaikan upah minimum tahun depan semestinya mencapai 7,77%, hasil gabungan inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12%.

Namun kalangan pengusaha menilai formula itu memberatkan dan bisa merusak struktur pengupahan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menegaskan, usulan buruh tersebut jauh dari masuk akal.

"Bukan kurang sesuai, tapi tidak masuk akal. Kalau berbicara kurang sesuai, bisa disesuaikan, tapi ini tidak masuk akal. Jalan pikirannya berubah, mindsetnya coba ubah pikirannya," kata Nurjaman, Selasa (18/11/2025).

Nurjaman mengatakan, dunia usaha tetap mengusulkan agar alpha berada dalam rentang rendah, yakni

0,1 sampai 0,3 atau maksimal 0,5. Nilai itu dianggap masih memberi ruang gerak dalam struktur pengupahan yang berlapis.

"Ya kami tetap memohon untuk 0,1 sampai dengan 0,3 atau mungkin 0,1 sampai dengan 0,5. Supaya ada pergerakan," ujarnya.

Ia menjelaskan, upah minimum bukan satu-satunya komponen upah yang harus dipertimbangkan, karena di atasnya masih ada upah sektoral, skala upah, dan upah masa kerja untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

"Karena gini, bukan kita ini hanya memikirkan upah minimum saja, tentu ada kan upah sektoral. Setelah upah sektoral kan ada skala upah. Setelah skala upah, ada upah sundulan atau upah masa kerja. Kita tidak hanya mempertimbangkan upah minimum," jelasnya.

Jika UMP dinaikkan terlalu tinggi, menurutnya, struktur upah menjadi timpang dan pekerja yang masa kerjanya lebih lama justru tidak mendapat porsi kenaikan yang proporsional.

"Kalau upah minimumnya terlalu tinggi, maka yang di atas nanti nggak kebagian kuenya. Akhirnya variannya akan nggak jauh beda

tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau hari Minggu, pengumuman wajib dilakukan satu hari sebelumnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat formula penetapan UMP tahun depan masih belum rampung hingga kini, sehingga jadwal penetapan bisa saja bergeser ke Desember.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, proses pembahasan formula upah minimum masih berlangsung di pemerintah pusat.

"Terkait penetapan upah minimum provinsi maupun kota, sampai saat ini di kementerian masih menggodok terkait formula upah minimum. Masih dibahas di Depenas (Dewan Pengupahan Nasional), terkait dengan formulanya," kata Nurjaman, Selasa (18/11/2025). (wid,ist,cnbc/dya)

ANGKA KOMPROMI BURUH UNTUK KENAIKAN UPAH MINIMUM 2026:

- **Opsi kenaikan 6,5%**
Dasar dari opsi ini tidak dijelaskan secara rinci, namun dikatakan merujuk pada keputusan Presiden sebelumnya.
- **Opsi kenaikan 7,77%**
Angka ini didasarkan pada perhitungan yang menggabungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rinciannya adalah inflasi sebesar 2,65% ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%.
- **Opsi kenaikan 8,5% hingga 10,5%**
Ini merupakan opsi dengan kenaikan tertinggi yang diajukan oleh buruh. Usulan ini juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja.



dengan karyawan yang sudah lama dengan yang baru," ujar dia.

Terkait usulan buruh untuk menggunakan alpha 0,9 hingga 1,4, Nurjaman menjelaskan, nilai tersebut seolah-olah menempatkan seluruh pertumbuhan ekonomi sebagai hasil kerja pekerja, padahal perusahaan memiliki kontribusi besar melalui investasi, modal, dan fasilitas produksi.

"Ya kalau (alpha atau indeks tertentu) 1,0 gini, dia tidak membaca, pertumbuhan ekonomi itu diciptakan dari produktivitas. Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya diciptakan oleh pekerja saja, tapi pertumbuhan ekonomi itu diciptakan, dibentuk oleh perusahaan dan pekerja," tuturnya. (ist,wid,ktn/dya)